

HUTAN LESTARIA KANKAH RUSAK KARENA HPH?

Duwi Yunitasari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jember

ABSTRACT

Forests are important resources for humans, since forests can provide added value as well as the lungs of the world. forest management is faced with the HPH license HPH (Forest Management Right), which was often used as a means to earn a profit for themselves. There is collusion in the form of license sales which gives benefit to both parties. Where the governments get the money as the benefit while the entrepreneurs get profit to exploit the forest and the security guarantees from the governments. In here, there is Patron-klien pattern. Here actually, government intervention is needed as in the neo-classical theory. But, the fact the government had failed to intervene because of the limited human resources and government administration. So, it needs to strengthen the role of the moratorium Stake Holder and NGOs in the monitoring of forest management.

Keywords: HPH, collusion, patron-client, government failure

A. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan hutan selalu berhadapan dengan dua kepentingan yang saling berhadapan satu sama lain. Di satu sisi hutan dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang bisa dieksploitasi untuk menghasilkan nilai tambah, devisa dan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, pemanfaatan hutan dihadapkan pada kepentingan hutan dengan fungsinya sebagai sumber keanekaragaman hayati, sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan sebagai paru-paru bumi. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan ini diperlukan kebijakan yang sangat hati-hati, sebab jika tidak akan merusak hutan itu sendiri. Lebih dari itu, kerusakan hutan akan berdampak lanjutan yang harus ditanggung masyarakat seperti berkurangnya kesuburan tanah, banjir, atau tanah longsor yang nyata sekali dirasakan masyarakat Indonesia yang bermukim di sekitar hutan yang rusak.

Tahun 1999 kebutuhan real industri perkayuan Indonesia sesuai kapasitas terpasang industri pengolahan kayu mencapai 55 juta meter kubik kayu pertahun. Sedangkan target target produksi lestari dari hutan sesuai daya dukungnya hanya 22 juta meter kubik pertahun. Sehingga industri perkayuan kekurangan pasokan kayu sebesar 23 meter kubik kayu pertahun. (Kompas, 30 agustus 1999). Selama ini jika terjadi kekurangan pasokan kayu dipenuhi dari kayu-kayu curian (ilegal). Berdasarkan penelitian ernst and Young konsultan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk mengaudit sektor kehutanan dan kertas, pasokan kayu ilegal untuk memenuhi kebutuhan industri kayu di Indonesia mencapai 52 persen (Bisnis Indonesia, 9 November 1999). Hal ini tentunya mendorong perusahaan hutan secara cepat.

Menurut perkiraan bank dunia (1996), laju deforestasi (penebangan hutan) di Indonesia sekitar 1,04 persen pertahun selama periode 1980-1990. Laju deforestasi ini menduduki angka yang paling tinggi dibandingkan dengan dua negara lain yang memiliki hutan terluas di dunia, yaitu Brasil dan Zaire. Masih menurut bank dunia, laju deforestasi di kedua negara tersebut masing-masing dalam kurun waktu yang sama adalah 0,63 dan 0,62 persen. Jika pada tahun 1980 luas hutan Indonesia

menempati urutan kedua setelah Brasil, maka sejak tahun 1994 luas hutan Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Zaire.

Dari perspektif luas lahan, Indonesia termasuk 10 negara yang memiliki luas lahan terbesar di dunia. Pada tahun 2005, luas hutan Indonesia mencapai 88 juta hektar (nomor 8 di dunia). Dengan luas hutan sebesar itu, tidak heran jika Indonesia menjadi bagian dari paru-paru dunia. Tentunya luas hutan di Indonesia pada 30-40 tahun yang lalu jauh lebih luas dari itu mengingat laju deforestasi di Indonesia paling tinggi di dunia, nomor 2 (dua) di Dunia (Yustika, 2007:271).

Tabel 1. Sepuluh Negara yang Memiliki Hutan terluas di Dunia 2005 (juta Ha)

Negara	Luas Wilayah	Luas Hutan	Perubahan Luas Hutan*
Rusia	1.688,9	809	-96
Brasil	845,9	478	-3.103
Kanada	922,1	310	0
AS	915,9	303	159
China	932,7	197	4.058
Australia	768,2	164	-193
Kongo	226,7	134	-319
Indonesia	181,2	88	-1.871
Peru	128,0	69	-94
India	297,3	68	29

*Keterangan: * Tahun 2000-2005 ribu hektar/tahun)*

Sumber: FAO 2006 dalam Kompas, 12 April 2006

Berdasar tabel 1, Brasil menempati tingkat pertama di mana mempunyai tingkat di mana laju deforestasi sangat tinggi yakni 3,1 juta ha/tahun. Dalam setahun hutan di Indonesia hilang sebanyak 1,8 juta hektar akibat penebangan legal maupun liar (Illegal logging). Apabila laju deforestasi terjadi secara terus menerus, maka bukan tidak mungkin jika dalam waktu beberapa puluh tahun lagi, Indonesia tidak akan memiliki hutan. Hal yang sama juga terjadi di Peru yang menduduki posisi terkecil dalam laju deforestasi yaitu 0.94 juta ha per tahun.

Bahkan seperti yang dikutip dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Chalid Muhammad (dalam Kompas, 7 Juni 2007), Tahun 2006, sekitar 2,72 juta hektar hutan kita hilang, setiap menit kita kehilangan hutan seluas lima kali lapangan sepak bola dan ini terjadi karena salah kelola dalam kehutanan Indonesia. Bahkan di Aceh sendiri kehilangan dua kali lapangan sepakbola setiap hari atau setara 20.796 hektar.

Jika tidak terdapat perubahan fundamental, hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua akan hancur dalam 5, 10, dan 15 tahun kedepan (Kompas, 6 juni 2007).

Tabel 2. Luas Hutan Indonesia 1999/2000

1999/2000 (Ha) : Paduserasi TGHK/RTRWP							
Propinsi	HSAHPA	HL	HPT	HP	Hutan Tetap (21+22+23+24)	HPK	Jumlah (25+26)
1	21	22	23	24	25	26	27
DI. Aceh	852,421	1,844,500	37,300	601,392	3,335,613	0	3,335,613
Sumatera Utara	253,885	1,924,535	760,958	871,183	3,810,561	37,797	3,848,358
Sumatera Barat	846,175	910,533	246,383	407,849	2,410,940	189,346	2,600,286
Riau	560,237	361,967	0	2,649,608	3,571,812	334,521	3,906,333
Jambi	676,120	191,130	340,700	971,490	2,179,440	0	2,179,440
Bengkulu	444,882	252,042	182,210	41,830	920,964	70,360	991,324
Lampung	422,500	331,531	44,120	192,902	991,053	153,459	1,144,512
Sumatera Selatan	822,300	679,390	298,600	2,269,400	4,269,690	774,100	5,043,790
Sumatera	4,878,520	6,695,628	1,910,271	8,005,654	21,490,073	1,559,583	23,049,656
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	208,267	240,402	213,412	338,653	1,000,734	0	1,000,734
Jawa Tengah	3,139	75,538	174,185	396,050	648,912	0	648,912
DI Yogyakarta	283	1,462	0	15,320	17,065	0	17,065
Jawa Timur	230,250	315,515	0	881,453	1,427,218	0	1,427,218
Jawa	441,939	632,917	387,597	1,631,476	3,093,929	0	3,093,929
Kalimantan Barat	1,435,480	2,355,045	2,421,950	2,235,700	8,448,175	582,320	9,030,495
Kalimantan Tengah	680,580	1,014,130	4,593,003	4,448,222	10,735,935	0	10,735,935
Kalimantan Selatan	176,615	554,139	155,268	687,834	1,573,856	265,638	1,839,494
Kalimantan Timur	2,166,212	2,935,478	4,755,494	4,727,488	14,584,672	0	14,584,672
Kalimantan	4,458,887	6,858,792	11,925,715	12,099,244	35,342,638	847,958	36,190,596
Sulawesi Utara	429,065	341,447	552,573	168,108	1,491,193	34,812	1,526,005
Sulawesi Tengah	676,248	1,489,923	1,476,316	483,034	4,125,521	269,411	4,394,932
Sulawesi Selatan	843,966	1,928,597	828,255	186,666	3,787,484	102,073	3,889,557
Sulawesi Tenggara	274,069	1,061,270	419,244	633,431	2,388,014	212,123	2,600,137
Sulawesi	2,223,348	4,821,237	3,276,388	1,471,239	11,792,212	618,419	12,410,631
Bali	26,294	95,734	6,719	1,907	130,654	0	130,654
Nusa Tenggara Barat	139,025	421,451	334,409	126,278	1,021,163	244,062	1,265,225
Nusa Tenggara Timur	350,330	731,217	197,250	428,358	1,707,155	101,827	1,808,982
Maluku	443,345	1,809,634	1,653,625	1,053,171	4,959,775	2,034,932	6,994,707
Irian Jaya	7,539,300	11,452,990	3,365,475	10,379,684	32,737,449	2,671,275	35,408,724
Indonesia	20,500,988	33,519,600	23,057,449	35,197,011	112,275,048	8,078,056	120,353,104

Sumber : Statistik Kehutanan 1970, 1981, 1990/1991 dan 1999/2000

Secara total, luas hutan di Indonesia sebesar 120.353.104 ha. Yang meliputi untuk Pulau Sumatera 23.049.656 ha, Pulau Jawa 3.093.929 ha, Pulau Kalimantan 36.190.596 ha, pulau Sulawesi 12.410.631 ha, kemudian berturut-turut Bali 130.654 ha, Nusa Tenggara Barat (NTB) 1.265.225 ha, Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.808.982 ha, Maluku 6.994.707 ha dan Irian Jaya 35.408.724 ha. Dari tabel 2 tersebut terlihat bahwa pulau yang memiliki luas hutan terluas adalah Pulau Kalimantan, berturut-turut, pulau Irian jaya dan Sulawesi. Pulau yang memiliki luas hutan terkecil adalah pulau bali dengan luas hutan hanya 130.654 ha. Dari data tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2005, luas hutan Indonesia adalah 88 ribu hektar. Sedangkan pada tabel 2 Luas Hutan Indonesia tahun 1999/2000 berkisar 120.353.104 ha. Di sini terlihat bahwa dari tahun ke tahun luas hutan Indonesia mengalami penurunan. Hal ini sangat disayangkan karena seyogyanya dengan luas hutan yang kita miliki, kita dapat mengolah dan memanfaatkan hutan yang ada dengan sebaik-baiknya. Bukan malah rusak atau berkurang karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Green Peace (Jawa Pos, 5 Juni 2007) menyebutkan, 72 persen hutan asli Indonesia telah musnah dan separo hutan yang masih ada terancam karena penebangan komersial, kebakaran hutan dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit. Deforestasi di Indonesia disebabkan tiga hal utama, yakni, illegal logging, legal logging dan kebakaran hutan.

Selain pembalakan liar, hancurnya hutan di Indonesia disebabkan penebangan yang mendapatkan izin pemerintah melalui HPH (Hak Pengelolaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri).

B. SISTEM PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Konsep HPH (Hak Pengelolaan Hutan) adalah mengeksploitasi hutan selama 35 tahun melalui Rencana Karya Tahunan (RKT). Penebangan kayu dilakukan sesuai RKT terhadap blok-blok hutan secara berkeliling, sesudah itu ditanam kembali. Sehingga pada tahun ke 36 atau sesudah habis masa konsesinya, hutan pada RKT pertama dapat ditebang kembali. Dengan konsep ini diharapkan hutan dapat lestari. Namun pada prakteknya konsesi hutan dengan luas 100.000 hektar diberikan secara tidak selektif kepada pengusaha, yayasan-yayasan dilingkungan militer (ABRI), dan departemen pemerintahan. Di Era Orde Baru, pengelolaan hutan dipenuhi dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Pemberian konsesi HPH ini diwarnai dengan praktik kolusi antara penguasa dan pengusaha. Penerima HPH tidak memiliki modal keahlian, serta pengetahuan tentang kehutanan. Pada akhirnya mereka mencari mitra untuk mengeksploitasi hutan atau menjual konsesi HPH tersebut. Hal ini didorong sifat pengusahaan HPH yang padat modal karena dilakukan secara mekanis dengan alat-alat berat. Dengan pengusahaan sekitar 50.000 hektar, diperlukan modal operasi sekitar US\$6 juta (Kompas, 30 Agustus 1999).

Terdapat potensi rente yang bisa diperoleh birokrasi pemerintah untuk mengeksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) yaitu hutan, rente ekonomi eksploitasi SDA tersebut berasal dari konsesi ataupun kebijakan fasilitas lain yang diberikan kepada pelaku ekonomi (swasta). Sebagai produsen perijinan dan organ yang mendistribusikan aset ekonomi (SDA) negara, pemerintah maupun aparatnya memperoleh komisi (fee) atas pemberian ijin eksploitasi tersebut. (Yustika, 2007:263).

Kurang lengkapnya pemerintahan yang baik, memimpin pada kelompok kecil yang berkuasa atau klan dalam pemerintahan dimana hutan dipandang sebagai sumber daya jangka pendek bagi Keuntungan individu (Brown, 1999). Hal ini bagi sebagian penguasa yang memiliki naluri rent seeking behaviour, menjadikan SDA hutan sebagai ajang untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri melalui lisensi HPH tersebut.

Penguasaan HPH pada gilirannya terkonsentrasi pada beberapa gelintir pengusaha besar disekitar penguasa. Pengusaha besar tersebut hanya mengeksploitasi hutan tanpa melestarikan siklus tebang lestari. Pola Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang telah diterapkan pada tahun 1985 tidak diterapkan dengan baik oleh pengusaha tersebut (Faisal Basri, 2002:317).

Pola patron klien antara penguasa dan pengusaha sektor kehutanan, di mana penguasa mengeluarkan kebijakan atau perlindungan kepada pengusaha dan kemudian pengusaha memberikan setoran kepada penguasa. Masyarakat Perhutani Indonesia (MPI) yang berdiri pada tahun 1974, yang merupakan organisasi yang berfungsi melobi pejabat-pejabat negara untuk melahirkan keputusan yang menguntungkan kepentingan anggotanya. Begitu juga dengan Organisasi Asosiasi Produsen Kayu Lapis Indonesia (Apkindo) yang berdiri pada tahun 1976 yang kemudian berganti nama menjadi Asosiasi Panel Kayu Indonesia, berfungsi sebagai kelompok lobi pengusaha kayu lapis kepada pengambil keputusan pemerintah selain sebagai organisasi kartel yang bisa mengatur harga produk kayu lapis dan kuantitas yang ditawarkan ke pasar (Faisal Basri, 2002:317).

Dauvergne (1997) membantah bahwa di Asia Tenggara, hubungan *patron klien* adalah pusat untuk memutuskan alokasi konsensus kayu, perlindungan penebang illegal, tingkat pajak dan aspek lain dari kebijakan hutan. Ketika keberadaan hubungan patron klien tak terelakkan menjadi sulit untuk di buktikan, khususnya dalam kerahasiaan sistem lisensi, *World Bank* (2000) mengatakan bahwa biaya-biaya konsesi pohon/kayu adalah hal umum yang digunakan untuk kepentingan politik patron (penguasa) di Indonesia.

Migdal (1988) mengadakan observasi bahwa pejabat daerah berusaha menjadi alat kebijakan negara yang dihadapkan pada ketidak adaan dorongan yang mengelilingi kepentingan daerah, terutama karena ketidakadaan control dari luar dan pengawasan yang efektif. Sebagai hasilnya, pejabat daerah bebas menjalin hubungan dengan politisi local dan wirausahawan, dengan adanya kebebasan untuk

memilih kekuasaan diatas surat ijin, dan pelaksanaan hukum. Hal ini menolong keamanan klien, yang merupakan bentuk timbal balik atas dukungan patron dan memperoleh keuntungan finansial.

Korupsi yang diidentifikasi oleh Shleifer dan Vishney (1993) adalah penjualan oleh pejabat pemerintah pada tanah milik pemerintah untuk keuntungan personal. Korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah adalah untuk *rent seekers*. Proses yang dilakukan melalui pembayaran yang ilegal, penyogokan dan pertolongan politik. Sebab itu, konsesi hutan akan dialokasikan pada siapa yang menyuap paling tinggi, dengan mengalokasikan keuntungan hutan antara penyuap dan yang disuap.

Lemahnya kontrol dari luar juga mengakibatkan semakin maraknya tindakan Kolusi di antara penguasa dan pengusaha. Seperti yang terjadi di Jaman Orde Baru selama 30 tahun pemerintahan Presiden Suharto. Di mana perekonomian Suharto mirip dengan Kleptocracy yang terpusat secara langsung, adalah sistem dimana peraturan kebijakan politik dibuat untuk memaksimalkan pendapatan individu (Rose-Ackerman, 1999). Selain itu, maksimisasi pendapatan individu memungkinkan elit pemerintah untuk menggabungkan kekuatan dan menguasai untuk jangka waktu yang lama. Tindakan kolusi selain untuk mendapat keuntungan pribadi, juga sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini bisa di jalankan dengan mengadakan kolusi dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang memiliki modal dalam jumlah besar.

Tabel 3. Sembilan Grup Besar Pemegang HPH

No	Nama Grup	Unit	Luas (Ha)	Pemegang Saham
1	Barito Pacipic	29	3.016.661	PT. Barito Pacipic Timber, Prajogo Pangestu, Yayasan Mangadeg, PT Kampari Wood Indonesia, PT Multi Lestari Kencana, Yayasan Adi Upaya, Sudarto, Ateng Suarsono.
2	Kayu Lapis Indonesia	18	2.732.712	Keluarga Sutanto, PT KLI, Yunita Kuswoyo, Hunawan Wijaya, PT Henrison Iriana.
3	Kalimanis	9	1.865.500	PT Kalimantan Ply Ind. Erlina Wahyu, PT Kiani Sakti, PT Metra 72.
4	Alas Kesuma	13	1.542.845	Iwan Susanto, Amin Susanto, Suhadi, Nani Santoso, Kel Susano.
5	Korindo	4	1.181.050	PT Tecwin Jaya, In Young Sun, PT Pel. Dowentindo Frest Metcote.
6	Budhi Nusa	7	1.137.700	Burhan Uray, Soejono Varianata, Yjuk B. T Sihol V. Batubara
7	Djajanti Djaja	9	1.112.100	Burhan Uray, Herman Pieters, Dyan Dita Reni, Adhi Sarwanto, Budhi Sarsito, Edy Sarjono
8	Wapoga	3	1.030.700	PT Melapi Timber, PT Nusa Bintang Kirana
9	Prabu	4	1.085.700	PO Suwandi
10	Jumlah	96	14.704.968	

Sumber: Business News, 21 Mei 1999.

Dari tabel 3 tersebut bisa dilihat bahwa pemegang HPH merupakan konglomerat-konglomerat terkenal di Indonesia. Yang nota bene memiliki modal yang cukup besar. Pemegang unit HPH terbesar, dipegang oleh Barito pacific sebanyak 29 unit dengan luas hutan 3.016.661 dan terbesar kedua

dipegang oleh Kayu Lapis Indonesia sebanyak 18 unit dengan luas Hutan 2.732.712. Pengusaha-pengusaha tersebut juga memantapkan posisi patron kliennya.

Tabel 4. Perkembangan Hak Penguasaan Hutan (HPH Alam) Sepuluh Tahun Terakhir
Forest Concession Existence Last Ten Years

NO.	TAHUN <i>Year</i>	JUMLAH <i>(UNIT)</i>	LUAS AREAL (JUTA HA) <i>Area (Millions Ha)</i>
1	1990/1991	564	59,62
2	1991/1992	567	60,48
2	1992/1993	580	61,38
4	1993/1994	575	61,70
5	1994/1995	540	61,03
6	1995/1996	487	56,17
7	1996/1997	447	54,09
8	1997/1998	427	52,28
9	1998/1999	420	51,58
10	1999/2000	387	41,84

Sumber: Direktorat PHP

Pada Tabel 4, jumlah pemegang HPH secara keseluruhan mengalami penurunan pada 10 tahun terakhir mulai tahun 1990/1991 sampai 1999/2000. Tetapi ternyata hal ini tidak menjamin bahwa luas hutan di Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Karena seperti terlihat pada tabel 1 dan tabel 2, luas hutan pada tahun ke tahun mengalami pengurangan, hal ini di karenakan penebangan legal maupun illegal.

Dalam mendapatkan HPH, pengusaha-pengusaha juga menjalin suatu kerjasama yang dinamai "pola patron klien".

Untuk melanggengkan pola patron-klien, pengusaha-pengusaha tersebut juga dikenai berbagai pungutan atau setoran wajib dari pengusaha kepada penguasa sipil maupun militer, dari tingkat lokal sampai tingkat pusat. Sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha semakin besar. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan pengusaha selain ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, juga mengeksploitasi hutan secara membabi buta tanpa memperdulikan aspek kelestarian hutan. Berikut merupakan Perusahaan-perusahaan yang memiliki SK definitif dalam pengelolaan Hutan

Tabel 5. Data Perkembangan HPH yang Memperoleh SK Definitif

Propinsi : NANGG ROE ACEH

DARUSSALAM

Bulan : Agustus 2006

Data Perkembangan HPH yang Telah Memperoleh SK. Definitif

Propinsi : SUMATERA UTARA

Bulan : Agustus 2006

Data Perkembangan HPH yang Memperoleh SK Definitif

Propinsi : SUMATERA BARAT

Bulan : Agustus 2006

Data Perkembangan HPH yang Memperoleh SK. Definitif

Propinsi : RIAU

Bulan : Agustus 2006

	NAMA HPH	SK HPH (No & Tgl SK. HPH)	LUAS (Ha)	KETERANGAN
A Swasta		293/Kpts-IV/87, 3-9-1987	51.000	
1	PT. Dexter			
2	PT. Siak Pakan	295/Kpts-IV/87, 3-9-1987	46.000	
3	PT. Yos Raya	243/Kpts-I I/89, 24-5-	97.000	
4	PT. Dexter	24/Kpts-II/92, 11-1-1992	48.500	*)
5	PT. Riau Putra	845/Kpts-VI/99, 7-1 0-1	49.565	
6	PT. Mutiara	109/Kpts-II/2000, 29-12-	44.595	
7	PT. Asri Nusa	21/TP/II/2002, 25-2-2002	27.200	Ijin Bupati Inhil, telah pengakuan Menhut (Menhut No. S.504/M-
7	Jumlah		363.860	
B BUMN		-	-	
	Jumlah		-	
C Penyertaan saham		469/Kpts/U/778, 26-7-78	47.687	
1		802/Kpts-VI/99, 30-9-1999		
2	PT. Kulim	848/Kpts-VI/99, 8-1 0-1	73.975	*)
3	PT. Mandau	100/Kpts-II/2000, 26-12-	52.040	
4	PT. Nanjak	108/Kpts-II/2000, 29-12-	48.370	
5	PT. Siak Raya	89/Kpts-II/2001, 15-3-	38.560	
6	PT. The Best One	38/Kpts-II/2001, 15-2-2001	50.620	
7	PT. Diamond Raya Timber	443/Kpts-II/1 998, 8-5-1 998	90.956	
7	Jumlah		402.208	
D Patungan		840/Kpts-VI/99, 6-1 0-1	45.990	
1	PT. Hutani Sola Lestari	999		
1	Jumlah		45.990	
1	TOTAL LUAS		812.058	

Data Perkembangan HPH yang Memperoleh SK. Definitif

Propinsi : JAMBI

Bulan : Agustus 2006

	NAMA HPH	SK HPH (No & Tgl SK. HPH)	LUAS (Ha)	KETERANGAN
A. Swasta				
1	PT. Injapsin Lestari (d.h PT. Injapsin Co.)	107/Kpts-IV/88, 29-2-1988 205/Kpts-II/2000,17-7-2000	49.000	SK diserahkan tgl 10 Mei 2006
2	PT. Putra Duta Wood	01/Kpts-IV/1997, 1-1-1999	61.000	
3	PT. Serestra II	178/Kpts-IV/88, 21-3-1988	96.000	
4	PT. Asia Log	549/Kpts-II/88, 19-11-1988	70.269	
5	PT. Harapan Tiga Putra	116/Kpts-II/93, 25-2-1994 SK.382/Menhut-II/05, 11-11- 05	11.095	
5	Jumlah		287.364	
B. BUMN		-	-	
	Jumlah	-	-	
C. Penyertaan Saham		-	-	
	Jumlah	-	-	
D. Patungan				
1	PT. Dalek Hutani Esa	26/Kpts-II/2001,8-2-2001	52.080	
1	Jumlah		52.	
6	TOTAL LUAS		339.444	

Data Perkembangan HPH yang Memperoleh SK. Definitif

Propinsi : SUMATERA SELATAN

Bulan : Agustus 2006

No	NAMA HPH	SK HPH (No & Tgl SK. HPH)	LUAS (Ha)	KETERANGAN
A. Swasta				
1	PT. Bumi Pratama Usaha Jaya	604/Kpts-II/97, 18-9-1 997	56.000	
1	Jumlah		56.000	
B. BUMN		-	-	
	Jumlah	-	-	
C. Penyertaan saham		-	-	
	Jumlah	-	-	
D. Patungan		-	-	
	Jumlah	-	-	
1	TOTAL LUAS		56.000	

Data Perkembangan HPH yang Memperoleh SK. Definitif

Propinsi : BENGKULU

Bulan : Agustus 2006

No	NAMA HPH	SK HPH	LUAS (HA)	KETERANGAN
A. Swasta				Ijin Bupati Bengkulu Utara (Pengakuan Menhut No. 374/Menhut-VI/04 tgl.24-1 1-04)
	PT. Bentara Arga Timber	74 Tahun 2002, 19-2-2002	23.000	
	Jumlah		23.000	
B. BU				
	Jumlah		-	
C. Penyertaan Saham				
	Jumlah		-	
D. Patungan				
	Jumlah		-	
TOTAL LUAS			23.000	

Dari data ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki SK Definitif. Semua perusahaan yang memiliki SK definitif merupakan perusahaan swasta dan tidak ada satupun terdapat peranan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang mengindikasikan bahwa untuk mengelola HPH ternyata di perlukan modal besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan HPH jatuh ketangan perusahaan-perusahaan bermodal besar. Perusahaan-perusahaan yang memiliki SK HPH diharapkan agar SK tersebut tidak dijadikan sebagai suatu alat untuk melakukan deforestasi lebih jauh.

C. SISITEORITIS

Dalam Teori NeoKlasik, pemanfaatan sumber daya hutan tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada mekanisme pasar karena: (Caporaso dan Levine, 1994:87-92):

1. *Adanya Poperty Right*

Dengan mengandalkan mekanisme pasar. Poperty Right tidak menganggap semata-mata sebagai kerangka kerja dari aktifitas ekonomi, tetapi didesain sebagai bagian sistem yang mengatur kegiatan ekonomi itu sendiri, yang memungkinkan setiap pelaku ekonomi mendapat maximisasi profit. Di mana perusahaan pengelola hutan diberi hak untuk mengelola hutan dalam jangka waktu lama yang memungkinkan pengusaha-pengusaha tersebut melakukan deforestasi yang semakin besar.

2. *Eksternalitas*

Jika eksternalitas negatif eksis, perbaikan kesejahteraan sulit tercapai, karena eksternalitas tidak dimasukkan dalam mekanisme harga. Pemerintah selalu melakukan intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar berupa eksternalitas negatif yaitu berupa kerugian yang ditanggung masyarakat akibat dampak negatif dari perusakan hutan tersebut.

Intervensi Pemerintah dapat dilakukan dengan jalan meng-internalisasi biaya lingkungan akibat kerusakan hutan dengan memungut pungutan-pungutan sebagai kompensasi. Pungutan yang berfungsi sebagai internalisasi biaya pada sistem HPH adalah dana reboisasi, iuran hasil hutan, dan pungutan dana pembinaan masyarakat. Pungutan ini akan meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat produksi. Intervensi lain yang dapat dilakukan adalah pengawasan langsung di lapangan dan menetapkan standar pengelolaan hutan agar lestari. Tetapi sistem ini pun tidak lepas dari kegagalan Pemerintah (*Government Failure*), yaitu tidak berfungsinya intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar berupa eksternalitas tadi karena pemerintah tidak

memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang sumber daya kehutanan dan lingkungan sosial (Hariadi Kartidiharjo, 1999).

Hal terpenting yang mendasari penyebab ketidak lestarian aktivitas hutan antara lain; *illegal logging*, pasar dan kegagalan pemerintah (Pearce dan Brown, 1994).

Permasalahan-permasalahan mengenai sumber daya hutan (Alisjahbana, 2006:2) meliputi:

1. Eksternalitas yaitu kegagalan pasar untuk memberikan gambaran biaya atau harga yang sesungguhnya dari suatu sumber daya kepada pelaku ekonomi atau pengambil kebijakan. Tidak adanya pasar untuk berbagai SDA dan Lingkungan menjadikan pelaku ekonomi menganggap biaya penggunaan sumber daya tersebut rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.
2. Kegagalan institusional, di mana terjadi ketidak jelasan akan hak kepemilikan (*Property rights*) .
3. Kegagalan pemerintah atau kegagalan kebijakan (*Policy Failures*), yaitu kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah justru memberikan distorsi dan memberikan sinyal-sinyal yang salah kepada pelaku ekonomi akan nilai dari SDA.

Sampai saat ini pun, pemerintah tidak memiliki ukuran kinerja yang secara efisien dan efektif dapat di gunakan untuk mengevaluasi sistem kerja HPH. Sistem pelaporan HPH lebih bersifat administratif dan tidak menggambarkan fakta di lapangan (Ibid).

Setelah berlangsung sekian lama terjadi persoalan yang berkaitan dengan program HPH tersebut. Beberapa alasan keberatan atas lisensi HPH, yaitu:

1. Studi Walhi menunjukkan bahwa sebagian besar (83%) rente ekonomi dari eksploitasi hutan disedot oleh pengusaha hutan dan hanya 17% yang menjadi pendapatan pemerintah pusat maupun daerah (Ramli, 1999:27).
2. Lisensi HPH hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai modal besar.
3. Penerimaan negara dari sektor hutan, baik yang berupa pungutan-pungutan ataupun iuran-iuran. Tidak pernah dibuka kepada publik.
4. HPH yang berakibat pada deforisasi hutan secara besar-besaran mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu, punahnya keanekaragaman hayati, banjir, tanah longsor, pemanasan global dan degradasi tanah.

Studi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2006) tentang daya dukung pulau jawa. Dari perhitungan jejak ekologi (*ecological footprint*) ditunjukkan, daya dukung pulau jawa sudah melampaui (*over shoot*) . Desa-desa yang lokasinya rawan banjir bandang, banjir tahunan, dan rawan longsor masing-masing berjumlah 257, 2.846, dan 1.970 desa. Dari analisis isi media (koran) ditunjukkan selama periode 2004-2006 telah terjadi banjir, longsor dan kekeringan masing-masing di 102, 51 dan 97 kabupaten/kota. Sedangkan sawah yang pernah mengalami banjir, longsor dan kekeringan masing-masing berjumlah 249.863 ha, 314.72 ha, dan 790.699 ha (Kompas, 22 Mei 2007).

D. PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM (HUTAN)

Salah satu sumber yang terpenting selain sumber daya manusia adalah sumber daya alam. Sehingga penting untuk menjaga sumber daya alam untuk kemaslahatan umum. Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam tidak lepas dari keadilan/ pemerataan antar generasi sekarang dibandingkan dengan generasi yang akan datang, selain pemerataan antar kelompok masyarakat di suatu waktu tertentu. Sumber daya alam pada hakekatnya adalah warisan yang membutuhkan pengelolaan yang sangat hati-hati agar masih tetap tersedia dalam jumlah yang cukup untuk generasi yang akan datang. Eksploitasi sumber daya alam-hutan secara berlebihan juga akan menimbulkan akibat tidak baik yang akan di tanggung oleh generasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sehingga untuk mengatasi sumber daya alam hutan ini, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan secara berlebihan, misalnya berupa penetapan pajak. Pemerintah sebagai agen yang independen dan bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu menemui kegagalan-kegagalan. Upaya dalam mengatasi Kegagalan Pemerintah perlu didukung dengan kapabilitas SDM, informasi yang akurat dan menghindari kolusi, korupsi dan Nepotisme. Dalam mengatasi kegagalan pemerintah, pemberdayaan pihak-pihak terkait (*stake Holders*). Masyarakat secara umum pun bisa menjadi stake holder karena adanya juga kepentingan masyarakat terhadap hutan tersebut.

Faisal Basri (2002:324) mengatakan: paradigma lama dalam mengatasi masalah sumber daya alam dan lingkungan yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena keterbatasan pemerintah dan kemampuan personal.

Selain penguatan stake holder, Jeda Tebang (*moratorium logging*) dan peran *Non Government Organization* (NGO) di bidang lingkungan menjadi sangat strategis untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kehutanan. Sehingga Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), mengenai lingkungan yakni mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program nasional dan merehabilitasi sumber daya alam yang rusak, yang dicanangkan mencapai target pada 2015 bisa sekaligus tercapai (Kompas, 30 Mei 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S., 2006, *Konsep dan Realitas Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tren dan Implikasi Kebijakan*. Paper disampaikan dalam acara kongres ISEI XVI di Manado. 18-20 Juni. Tidak dipublikasikan.
- Brown DW, 1999, *Addicted to rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia; Implication for Forest Sustainability and Government Policy*, Report No. PFM/EC/99/06, Indonesia-UK Tropical Forest Management Programme (ITMFMP), Jakarta, Indonesia.
- Business News, 21 Mei, 1999.
- Kompas, *Cara Lain Membaca MDGs*, 30 Mei 2007.
- Dauvergne, P., 1997, *Shadows In the Forests: Japan and the Politics Of Timber in Southeast Asia*, MIT Press, Cambridge and London.
- Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hariadi Kartidihardjo, 1999, *Belenggu IMF dan World Bank, Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia*, Bogor, Penerbit Pustaka Latin.
- Hariadi Kartodihardjo, *Kembali pada Pelestarian Kehati?* Kompas, 22 Mei 2007.
- Kompas, *HPH, Hak Pembabatan Hutan*, 30 Agustus 1999.
- Jawa Pos, *Hutan Potensi yang diabaikan: Sumbang Pemanasan Global* (Laporan Khusus), 5 Juni 2007.
- Ibid
- Industri Kayu Pakai 52% Log Illegal, *Bisnis Indonesia*, 9 November 1999.
- Kompas, *Kebijakan Jeda Tebang Di Aceh Patut di Contoh: Indonesia Kehilangan Hutan 2 Juta Hektar Setiap Tahun*, 7 juni 2007.
-

Kompas, *Ketika Pohon Terakhir Tumbang*, 6 Juni 2007.

Kompas, 12 April 2006.

Luas Hutan Indonesia Tahun 1999-2000, WWW Google.

Migdal, JS., 1988, *Strong Societies and Weak States: State Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Pearce, DW and Brown, K., 1994, *The Causes of Tropical Deforestation*, UCL Press, London, UK.

Perkembangan HPH yang memperoleh SK Definitif pada beberapa Propinsi, WWW. Google.

Ramli, Rizal., 1999, *Intervensi Negara dalam Industri Kayu Lapis*, Prisma No. 6 Tahun XXI.

Rose-Ackerman, S., 1999, *Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform*, Cambridge University Press.

Kompas, *Timpang Kapasitas Industri dan Pasokan Kayu*, 30 Agustus 1999.

Sheileifer, A dan Vishny, RW., 1993, *Corruption*, The Quarterly Journal of Economics, August 1993, p. 599-615.

Yustika Erani, 2007, *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.